

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Perjuangan umat Islam Indonesia secara Ideologis mulai tampak pada masa awal menjelang kemerdekaan, dan berlangsung sampai pasca kemerdekaan,¹ yaitu tepatnya bermula dari konflik-konflik antara pemimpin politik dari berbagai golongan ideologi tentang dasar negara bagi Indonesia setelah merdeka.

Pembicaraan serius mengenai dasar negara ini, terjadi antara wakil-wakil golongan umat Islam dan kelompok Nasionalis sekuler dalam BPUPKI yang didirikan pada tanggal 9 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagaimana telah diumumkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 9 September 1944.² Di dalam BPUPKI inilah berlangsung pembicaraan-pembicaraan yang cukup lama, yang akhirnya muncul gagasan negara berdasar Islam secara resmi buat pertama kali dalam sejarah moderen Indonesia dan menjadi isu yang paling krusial dalam pembicaraan itu.

¹Perjuangan Umat Islam tentang dasar negara muncul lagi dalam sidang Konstituante sebagai hasil Pemilihan Umum 1955. Lihat J.C.T. Simorangkir SH., Penetapan U U D, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 81-107.

²Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi, Hudaya, Jakarta, 1970, hal. 11. Lihat juga Marwati Djoenet Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 66.

Pembicaraan tentang dasar negara ini cukup tegang dan panas serta telah mewarnai perjalanan sejarah moderen Indonesia dan telah memaksa para pendiri Republik ini untuk menjalani masa-masa yang sulit dalam perjalanan negeri ini. Tapi akhirnya sebuah kompromi politik atau konsensus nasional antara kelompok "Nasionalis Islam" dan "Nasionalis Sekuler" dapat dicapai dalam bentuk Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945.³

Dengan Piagam Jakarta ini berarti kelompok Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, tapi sila pertama yaitu sila Ketuhanan diikuti anak kalimat yang berbunyi " ... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya "⁴ Anak kalimat inilah salah satu alasan, mengapa wakil-wakil Umat Islam dapat berkompromi dengan kelompok Nasionalis Sekuler.

✓ Tapi, kompromi tersebut di sisi lain telah menimbulkan rasa tidak puas bagi golongan minoritas, yaitu orang-orang Kristen. Ketidakpuasan itu muncul disebabkan anak kalimat pada sila pertama sebagaimana tersebut diatas. Untuk mengetahui bagaimana sikap wakil-wakil umat Islam terhadap ketidakpuasan golongan minoritas tersebut, maka ikutilah apa yang dikatakan Ahmad Syafi'i Ma'arif di bawah ini :

Setelah melewati saat-saat yang kritis maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Tetapi

³Piagam Jakarta adalah rumusan Pancasila dimana sila pertama diikuti anak kalimat yang berbunyi " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ". Lihat Endang Saifuddin Anshori, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka, Bandung, 1983.

⁴Mohammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, Jakarta, Prapanca, 1959, hal. 276.

silanya pertama yaitu sila Ketuhanan mendapat tambahan atribut yang sangat kunci, hingga menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Modifikasi sila pertama ini dipandang sangat berarti, sebab dengan jalan demikian wakil-wakil umat Islam tidak berkeberatan dengan formula baru Pancasila itu.⁵

Sebagian orang menganggap bahwa penghapusan anak kalimat dari sila pertama kemudian diganti dengan, "... Yang Maha Esa", adalah merupakan suatu kekalahan politik wakil-wakil umat Islam. Tetapi Alamsyah Ratu Prawiranegara (pada waktu itu masih menjadi Menteri Agama) menafsirkan peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai hadiah umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan.⁶

Demikianlah perjuangan umat Islam secara ideologis di sekitar kemerdekaan, kemudian perjuangan mereka selanjutnya ditujukan kepada suatu usaha untuk mengeluarkan aspirasi politiknya secara teratur dan berencana. Usaha umat Islam sebagaimana dimaksudkan diatas, adalah mendirikan suatu partai politik yang mampu menampung aspirasi politik golongan-golongan terbesar umat Islam Indonesia.

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 107.

⁶ Hal itu sering beliau sampaikan dalam sambutan-sambutannya di muka Tri Civitas Akademica IAIN, baik dalam acara Dies Natalis / Lustrum dan acara lainnya, dan juga sering disampaikan di hadapan tokoh-tokoh Ulama / Kyai. Lihat Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982, hal. 31-32.

*Usaha pembuatan partai politik ini, dilihat dari sisi lain juga sebagai jawaban positif umat Islam, terhadap manifesto politik Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 1 Nopember 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai,⁷ dan juga merupakan amanat Proklamasi Kemerdekaan R I 1945 yang memberi kesempatan kepada semua aliran politik yang dianut bangsa Indonesia dengan bebas membentuk partai-partai politik, dimaksudkan sebagai sarana demokrasi.⁸

Wujud usaha tersebut diatas adalah berupa partai politik Islam Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) yang didirikan melalui kongres umat Islam diYogyakarta pada tanggal 7 Nopember 1945.⁹ Masyumi merupakan awal integrasi pasca kemerdekaan dari semua gerakan Islam, baik nasional maupun lokal, sosial-politik maupun sosial-keagamaan, bahkan juga mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama moderenis dan tradisional, disamping dari pemimpin-pemimpin non-ulama Jawa-Madura serta pemimpin umat dari luar Jawa, walaupun di sini perlu dicatat ada gerakan Islam lokal yang tidak mendukungnya, yaitu Perti dari Sumatera Barat.

Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, di dalamnya terdapat anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (organisasi). Dengan kema-jemukan anggota ini, Masyumi pada dekade awal berdirinya diharapkan dapat menjadi suatu partai politik yang

⁷S.U. Bayasut, Fakta Dokumenta I, tanpa penerbit, Surabaya, 1966, hal. 7

⁸Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, pasal 28, yang berbunyi; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

⁹B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, Terjemahan Grafiti Pers, 1985, hal. 43.

dapat menampung semua aspirasi politik kelompok-kelompok Islam, yang akhirnya dapat menjadi suatu partai politik Islam yang kuat, untuk menandingi kekuatan politik lainnya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kemajmukan itu telah membawa Masyumi kepada suatu perpecahan, yang akhirnya menuju kepada kelemahan, disebabkan karena semua orang menonjolkan semangat golongan yang mengalahkan semangat persatuan dalam tubuh partai itu.

- Hal itu terbukti, kata sepakat tentang Masyumi - sebagai satu-satunya partai politik Islam yang dicapainya dalam kongres Nopember 1945, dalam perkembangan tahun-tahun berikutnya tidak bertahan lama. Yaitu dengan keluarnya PSII dari Masyumi pada bulan Juli 1947 dan menyatakan diri sebagai partai politik independen.

Kemudian peristiwa yang lebih parah lagi terjadi di dalam tubuh Masyumi, yaitu dengan keluarnya NU pada tahun 1952 dan menyatakan diri sebagai partai politik. Bermula dari sini, integrasi kekuatan politik Islam untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan bisa dikatakan tidak berhasil. Sejak saat itu, umat Islam mulai berjuang melalui kelompok masing-masing dengan membawa aspirasi politik sendiri-sendiri, dan pada suatu saat dalam persoalan tertentu mereka saling menjejal dan menjatuhkan, walaupun di sini perlu dicatat bahwa mereka sering berada dalam satu kubu dalam pembicaraan masalah Islam dalam kaitannya dengan masalah negara.

Gambaran tingkah-laku mereka tersebut bukanlah masalah baru, tapi merupakan semacam peristiwa ulang terhadap apa yang mereka lakukan sebelumnya. Peringat mudah berkumpul, bertikai dan akhirnya berbaik-baik ada

lah merupakan ciri dari perjalanan sejarah umat Islam Indonesia, dan hal itu dianggap dalam batas wajar bagi masyarakat Islam yang majemuk dalam pengertian tersendiri, atau dapat dimungkinkan sebagai suatu percaturan dari masyarakat yang sedang belajar memahami dirinya.

Dalam kerangka kajian ini, akan dipaparkan tingkah-laku umat Islam sebagai pengulangan yang ke sekian kalinya ciri khas mereka, yaitu berkumpul, bertikai dan akhirnya berbaik-haik. Hal tersebut mereka lakukan dalam suatu keadaan yang lain dari keadaan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru, dimana kondisi partai-partai banyak dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah. Dari situ pembahasan skripsi ini akan merilai sejauh mana faktor eksternal dan internal telah mempengaruhi adanya peristiwa berkumpul dan bertikai yang terjadi antara umat Islam sekarang ini.

B. Penegasan Judul.

Untuk menghindari salah pengertian dan sekaligus untuk mendapatkan pengertian terhadap apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu ditegaskan judulnya sebagai berikut :

1. Integrasi ; dimaksudkan sebagai penyatuan supaya menjadi kebulatan atau menjadi utuh.¹⁰ Integrasi erat sekali kaitannya dengan proses atau keadaan yang melatarbelakangi, yaitu adanya kelompok-kelompok atau unsur-unsur.

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 384.

2. Kekuatan Politik Islam; dalam kaitannya apa yang dimaksud Integrasi di atas, adalah menunjuk kepada organisasi-organisasi yang beridentitaskan Islam, baik organisasi yang berupa sosial-keagamaan maupun organisasi sosial-politik yang secara implisit organisasi-organisasi itu melatarbelakangi atau menjadi unsur terwujudnya Integrasi. Organisasi keagamaan menunjuk pada organisasi yang tidak punya wadah sebagai saluran politiknya dan tidak mau menggabungkan diri dengan organisasi politik yang ada. Organisasi-organisasi tersebut berintegrasi dalam partai politik baru, yaitu Parmusi. Sedangkan organisasi-organisasi sosial-politik menunjuk pada partai politik yang ada yaitu NU, Perti, Parmusi dan PSII, yang akhirnya berintegrasi dalam wujud Partai Persatuan Pembangunan - (P P P).
3. Dalam Era Orde Baru (1966 - 1984); dimaksudkan bahwa berlangsungnya Integrasi adalah pada masa Pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintahan yang ada setelah keluarnya Surat Berintah 11 Maret 1966 dan masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian yang dimaksud dengan tahun 1966-1984, adalah merupakan batasan, bahwa berlangsungnya Integrasi dengan segala permasalahannya hanya terbatas pada sekitar tahun 1966 sampai tahun 1984.

Dengan beberapa penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa " Integrasi Kekuatan Politik Islam Dalam Era Orde Baru (1966-1984) " sebagai judul skripsi ini adalah dimaksudkan sebagai hasil aktifitas para pemimpin partai politik Islam dalam rangkaian usaha mewujudkan langkah bersama untuk memperkuat posisi politiknya

dalam percaturan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung antara tahun 1966 sampai tahun 1984.

C. Alasan Pemilihan Judul.

Hal-hal yang berkenaan dengan alasan pemilihan judul skripsi ini, dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Kekuatan umat Islam yang berintegrasi adalah merupakan konsep yang dinashkan dalam Al-Qur'an dan dalam perjalanan sejarahnya. Umat Islam selalu mengundangkan ke arah itu, naumun sebegitu jauh hambatan selalu menghadang di hadapannya, dan dapat dikatakan setiap usaha ke arah cita-cita itu, tidak atau belum mencapai seperti apa yang diharapkan.
2. Umat Islam Indonesia, dalam hal ini kekuatan-kekuatan politiknya senantiasa menjadi pertimbangan dan titik perhatian yang cukup menentukan dalam percaturan kehidupan politik bangsa dan negara ini.
3. Dalam perjalanan sejarahnya antara tahun 1966 sampai tahun 1984 kekuatan-kekuatan politik Islam telah menampilkan aktifitas-aktifitas politiknya ke dalam suatu arena pergulatan yang penuh liku-liku. Kondisi politik mereka dan perubahan sistim politik yang ada telah mengundang mereka untuk mengadakan Integrasi , namun usaha itu ternyata hanya bertahan beberapa waktu saja, yang akhirnya pecah berantakan.
4. Gambaran tingkah-kaku kekuatan politik Islam sebagaimana tersebut di atas, tidak sedikit pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan umatnya, bahkan pada akhirnya tercipta kelompok-kelompok politik yang untuk beberapa lama cenderung makin menajam dan terja-

dilah konflik / kemelut, yang mana hal ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi politik negara yang sedang melaksanakan pembangunan ini.

D. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah.

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini akan meliputi ti sekitar :

1. Gambaran tentang perjalanan perjuangan umat Islam, dalam hal ini kekuatan politik Islam, kaitannya dengan masalah Integrasi, pada dekade terakhir Pemerintahan Orde Lama dan dekade awal Pemerintahan Orde Baru.
2. Langkah-langkah Integrasi kekuatan politik Islam pada masa Pemerintahan Orde Baru dalam batasan waktu, antara tahun 1966 sampai tahun 1984.
3. Gambaran tentang perjalanan Integrasi Kekuatan Politik Islam beserta beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan untuk utuhnya Integrasi, dan akhirnya hal-hal itu menyebabkan terjadinya kemelut dan perpecahan.

Berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Integrasi kekuatan politik Islam dalam era Orde Baru, sejauh mana faktor internal dan faktor eksternal dapat mendorong terwujudnya integrasi diantara mereka.
2. Betapapun sudah dicanangkan gagasan-gagasan bersatu tetapi toh akhirnya persatuan itu berakhir dengan kemelut yang menuju kepada perpecahan yang tidak dapat diutuhkannya lagi. Kenyataan itu sudah pernah terjadi dalam sejarah umat Islam Indonesia, yaitu Partai

Masyumi dan kenyataan itu terjadi pula dalam tubuh Parmusi dan Partai Persatuan Pembangunan.

3. Berkenaan dengan kondisi umat Islam tersebut di atas maka perlu diketahui, mengapa dan bagaimana kenyataan itu sampai terjadi.

E. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini disamping mempunyai tujuan formalitas perkuliahan, juga bermaksud dan bertujuan se bagaimana di bawah ini :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan peranan kekuatan politik Islam dalam percaturan politik di negeri ini, di sekitar masa transisi dari Pemerintahan Orde Lama ke Pemerintahan Orde Baru.
2. Agar halayak ramai khususnya umat Islam mendapatkan gambaran dan pengertian yang memadai tentang kebijaksanaan para pemimpin politik Islam dalam kaitannya dengan situasi politik Pemerintahan Orde Baru, yang berkenaan dengan integrasi diantara mereka, beserta tingkah-laku mereka selama integrasi berlangsung, utamanya sekitar batasan waktu dalam pembicaraan skripsi ini.
3. Dari pengertian sebagaimana dimaksudkan di atas, khususnya bagi umat Islam diharapkan dapat melihat kemunduran yang terjadi akibat pertentangan, perpecahan diantara mereka sebagai akibat dari Integrasi. Berangkat dari situ, umat Islam diharapkan dapat menyusun strategi perjuangan yang lebih baik di hari depan.
4. Dengan pengetahuan itu pula, umat Islam diharapkan dapat memikirkan dan sekaligus menjawab tentang masih dapatnya umat Islam dipersatukan dalam titik persama-

an, atau sebaliknya menganggap persatuan akan menjadi faktor kebekuan dan kemunduran.

F. Metode Penulisan.

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode sejarah,¹¹ adapun metode tersebut langkah-langkahnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Heuristik; yaitu pengumpulan data dari sumbernya,¹² maksudnya data-data yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini dikumpulkan.

Adapun sumber data dari pembahasan skripsi ini berupa :

a. Sumber Kepustakaan.

Sebagian besar pembahasan inti dalam skripsi ini menyangkut masalah kontemporer, maka untuk mendapatkan data-data kepustakaan yang diperlukan penulis berusaha menelusuri permasalahan yang dimaksud dari keterangan sumber pertama, terutama publikasi dari kekuatan-kekuatan politik yang bersangkutan. Selibihnya penulis mempergunakan buku-buku yang mendukung dan melengkapi yang disusun oleh orang lain sebagaimana tercantum pada daftar kepustakaan.

b. Sumber Lisan.

Sebagian besar pembahasan inti skripsi ini menyangkut masalah kontemporer, yaitu dimana terjadinya peristiwa, pelaku dan saksi peristiwa itu serta penulisnya berada dalam satu masa, maka sum

¹¹ Nugroho Notosusanto, Teori Sejarah : Peranannya dalam Rangka Studi Sejarah, Universitas Indonesia, 1963 hal. 56.

¹² Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978, hal 36.

berlesan sangat dimungkinkan. Kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis akan mengadakan wawancara dengan sebagian tokoh yang terlibat langsung atau tidak langsung, yang dianggap cukup representatif terhadap persoalan atau peristiwa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Kritik; yaitu metode untuk menilai data yang telah terkumpul, dengan tujuan agar memperoleh data yang otentik (kritik eksteren) dan data yang kredibel (kritik interen).¹³ Kaitannya dengan pengumpulan data sebagai kajian skripsi ini, penulis berusaha melakukan kritik terhadap data-data, agar memperoleh kebenaran data yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi ini kepada mata kebenaran ilmiah.

3. Analisa Data.

Metode yang dipergunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

a. Diskriptif Analisis ; artinya berusaha memaparkan kejadian tidak hanya dalam dimensi ruang dan waktu, tapi juga menguraikan kausalitas, faktor kondisional dan diterminan-diterminan dari peristiwa sejarah. Dalam pengertian, penulis berusaha tidak hanya mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan "bilamana" dan "dimana", tapi juga berusaha mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan "apa", "mengapa" dan "bagaimana" peristiwa itu bisa terjadi.

b. Metode Komperatif; yaitu mengadakan perbandingan beberapa data, kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁴

¹³ Louis Gottchalk, Mengerti Sejarah, Universitas - Indonesia, Jakarta, 1975, hal. 70-117.

¹⁴ Winarno Surahmat, Dasar dan Teknik Research, Bandung, Tarsito, 1972, hal. 135-136.

Disamping metode yang tersebut diatas, penulisan ini tidak terlepas dari teori-teori dan konsep - konsep ilmu sosial yang lain, hal ini adalah dalam batas wajar dalam rangkaian berfikir historis yang multi dimensional.

4. Penyajian Data.

Setelah melalui langkah heuristik, kritik dan analisa data, maka dapat dikatakan bahwa data-data sudah menjadi fakta dan langkah selanjutnya fakta-fakta itu sudah siap untuk disajikan (Historiografi)¹⁵ Pola penyajian data-data itu adalah informatif deskriptif analisis, yaitu suatu pola penyajian yang dikemukakan edemikian rupa menurut kemampuan penulis dan selaras dengan kenyataan yang ada, dalam bentuk skripsi ini.

F. Sistimatika Penulisan.

Bab Pertama : Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang melatarbelakangi permasalahan, beberapa hal yang berkenaan dengan penegasan judul serta ruang lingkup masalah dan rumusannya. Kemudian juga beberapa hal yang berkenaan dengan alasan pemilihan judul dan tujuan penulisan, berikut dijelaskan pula tentang metode dan sistimatika penulisan.

Bab Kedua : Orde Baru.

Bab ini menguraikan tentang sejarah lahirnya lahirnya Orde Baru dan juga masalah situasi politik yang terjadi pada awal Orde Baru, selanjutnya bagaimana konsep po-

¹⁵ Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. 42.

litik Orde Baru itu, juga akan dibicarakan dalam bab ini.

Bab Ketiga : Integrasi Kekuatan Politik Islam.

Kasus Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
1966 - 1973.

Pembahasan dalam Bab ini merupakan pembahasan inti yang meliputi : Kasus Partai Muslimin Indonesia; pembahasannya terdiri dari : Organisasi-Organisasi sebagai unsur, sejarah berdirinya dan sejarah perkembangannya sampai akhir Partai Muslimin Indonesia menjadi - salah satu unsur dari Partai Persatuan Pembangunan - (P P P).

Bab Keempat : Integrasi Kekuatan Politik Islam.

Kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1973 - 1984.

Pembahasannya meliputi partai-partai sebagai unsur, sejarah berdirinya dan sejarah perkembangannya sampai akhirnya terjadi kemelut dalam tubuh partai itu, yang akhirnya NU keluar dan menyatakan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan (kembali ke Khittah 1926).

Bab Kelima : Kesimpulan dan Penutup.

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan diakhiri dengan penutup sebagai tanda telah selesai penulisan ini.